

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja seks komersial atau PSK secara sederhana dapat diartikan sebagai individu yang memperoleh imbalan uang atau barang atau insentif ekonomi lainnya dengan memberikan layanan seksual (Sawicki *et al.*, 2019; Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Prinsip dasar transaksi pekerja seks komersial adalah adanya kesepakatan antara pekerja dan pengguna jasa mengenai jenis aktivitas seksual dan kompensasi yang diberikan, sehingga menitikberatkan pada konsep *consent* (May-Len Skilbrei dan Spanger, 2019). Pekerja seks komersial sering kali disebut sebagai profesi tertua di dunia yang diyakini telah ada sejak peradaban Sumeria hingga Romawi Kuno (Strong, 2016). Walaupun pekerja seks komersial identik dengan perempuan, di zaman Romawi Kuno pekerja seks komersial kebanyakan merupakan laki-laki (Strong, 2016). Saat ini pekerja seks komersial terdiri dari laki-laki, perempuan, maupun transgender (Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Serikat Pekerja Seks Internasional memperkirakan terdapat sekitar 52 juta pekerja seks komersial di seluruh dunia, dimana 80% dari seluruh pekerja seks komersial merupakan perempuan (International Union of Sex Workers, 2024).

Di Indonesia, sejarah awal prostitusi sangat sulit untuk ditelusuri. Namun, kultur feodal pra-kolonial di wilayah Indonesia, khususnya di berbagai kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa terdapat praktik pemberian upeti dalam bentuk penyerahan anak perempuan muda kepada raja-raja lokal (Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya Jakarta, 2016). Namun, perempuan muda pada konteks ini kurang sesuai dengan definisi modern pekerja seks komersial, karena perempuan muda ini pada umumnya tidak memiliki pilihan maupun kontribusi dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik pelacuran sudah eksis di wilayah Indonesia sejak era kolonialisme. Hal ini ditandai dengan munculnya regulasi pelarangan pelacuran dan pendirian panti rehabilitasi untuk perempuan pekerja seks di era kolonial oleh Belanda (Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya Jakarta, 2016). Pada akhir dekade 1950an, pemerintah Indonesia mengubah

paradigma penanganan prostitusi dan pekerja seks dengan meregulasi dan mengawasi (supervisi) tempat-tempat pelacuran di berbagai daerah di Indonesia yang sering disebut sebagai lokalisasi. Lokalisasi ini mempermudah pemerintah daerah dan Kementerian Sosial untuk melakukan pengawasan pekerja seks serta pencegahan penyebaran penyakit menular seksual (Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya Jakarta, 2016). Namun, sejak era reformasi, pemerintah Indonesia dan berbagai pemerintah daerah berusaha melakukan penutupan terhadap berbagai lokalisasi di Indonesia seperti Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Tanjung Elmo di Jayapura, dan ratusan lokalisasi lainnya di seluruh Indonesia (Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya Jakarta, 2016; Ginanjar, 2018). Penutupan ratusan lokalisasi ini ternyata tidak menyelesaikan prostitusi dan pekerja seks komersial, yang dengan dukungan perkembangan teknologi dan kemudahan komunikasi justru berpindah ke dalam ranah prostitusi daring melalui berbagai platform media sosial (Yusyanti, 2017; Juditha, 2021a; Lukas dan Umaternate, 2023; Triana, Erowati dan Pudyastiwi, 2023).

Berbeda dengan pekerja seks komersial yang bekerja di lokalisasi atau di rumah bordil, pekerja seks komersial daring tidak memiliki tempat beroperasi yang tetap, melainkan berpindah dari tempat ke tempat (Sanders *et al.*, 2017). Selain itu, prostitusi daring juga umumnya melibatkan komunikasi dan negosiasi langsung antara pekerja seks komersial dengan pembeli layanan seks yang sering dilakukan melalui media sosial (X/Twitter, Instagram, Facebook), aplikasi kencan (Tinder, Grindr), atau aplikasi percakapan daring (Line, MiChat, KakaoTalk) (Negoro dan Atmadja, 2014; Brennan, 2017; Irawan, Gultom dan Amsani, 2018; Lee, Choi dan Song, 2019; Frohnholzer, 2021; Juditha, 2021b; Firdaus dan Regieri, 2022; Juditha *et al.*, 2022). Pekerja seks komersial yang menawarkan pelayanannya melalui internet ini merupakan populasi pekerja seks yang paling mobil dan paling sulit diawasi dan dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan (The Bangkok Fast-Track Cities Committee, 2020).

Salah satu risiko pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja seks komersial adalah risiko tertular penyakit menular seksual. *Centers for Disease Control and*

Prevention (CDC) dan *World Health Organization* (WHO) mengelompokkan pekerja seks ke dalam kelompok populasi khusus dalam pengawasan dan penanganan penyakit menular seksual (Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Hal ini tentunya disebabkan oleh karena pekerja seks senantiasa berganti pasangan seksual, sehingga meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual (Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Namun, berbagai risiko ini dapat dimitigasi semaksimal mungkin dengan penerapan tindakan pencegahan serta pemeriksaan rutin (Centers for Disease Control and Prevention, 2022). Thailand merupakan salah satu negara dengan industri seks komersial yang masif yang berhasil melakukan kampanye untuk menekan angka kejadian infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS melalui promosi perilaku seksual yang sehat dan aman, pemberian kondom secara gratis kepada pekerja seks dan tempat-tempat prostitusi, edukasi kesehatan seksual pada semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, penanganan kasus penyakit menular seksual yang komprehensif, serta penapisan rutin pada kelompok berisiko tinggi (Chandeying, 2016; Harris dan Thaiprayoon, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Apa determinan terjadinya penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui determinan penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Mengetahui hubungan sosiodemografi dengan kejadian penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial.
- 2) Mengetahui jenis penyakit menular seksual yang dialami oleh pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial.

- 3) Mengetahui prevalensi penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial.
- 4) Mengetahui hubungan perilaku seksual dengan kejadian penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial
- 5) Mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian penyakit menular seksual pada pekerja seks komersial yang bekerja melalui media sosial tentang penyakit menular seksual dan pencegahannya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi kepustakaan determinan penyakit menular seksual, khususnya pada pekerja seks komersial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu pekerja seks komersial untuk meningkatkan kemawasan terhadap penyakit menular seksual, risiko penularan hingga pencegahannya. Sementara bagi lembaga swadaya masyarakat, fasilitas kesehatan (privat dan publik), serta pemerintah penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan gambaran kondisi di lapangan agar dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program pencegahan dan penanganan penularan penyakit menular seksual.

